

# PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM MASYARAKAT KOMUNITARIAN DI ACEH SINGKIL

**Rizkika Lhena Darwin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-raniry Banda Aceh  
*rizkikadarwin@ar-raniry.ac.id*

**Lidya**

Alumni Prodi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-raniry Banda Aceh  
*lyalidya@gmail.com*

## ABSTRACT

*Community Education Levels in 3 Villages namely: Gosong East Telaga Village, Ketapang Indah Village, Kampung Baru Village in North Singkil District, Aceh Singkil District are very low, but the level of participation in the direct election of the Village Head in North Singkil District is high. The high voter turnout reaches 60%, while the low voters value 40%. The high level of electoral participation generated by the participation of low-educated people involved with contributions and elections during the Direct Election of the Village Head. This paper wants to explain about the communitarian culture that is very strong in society so that it encourages politics for a sense of family, and encourages people to vote not because of rationality. Thus there was no education participation in the number of community participation in the village head election in 3 Singkil Utara Sub-Districts, Aceh Singkil District.*

**Keywords :** Pendidikan, partisipasi politik, Pilkades

## A. PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin menjelaskan bahwa pendidikan tidak berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat dalam konteks masyarakat komunitarian di Aceh Singkil. Dalam konteks masyarakat model komuntarian, setiap individu memiliki ikatan yang cukup kuat dengan komunitas, termasuk dalam hal turut berpartisipasi atau tidak dalam pemilihan (demokrasi elektoral). Maka tulisan ini akan mencari tahu beberapa hal. Pertama, sosial budaya dalam konsep masyarakat komunitarian di Aceh Singkil; kedua, pengaruh pendidikan terhadap partisipasi politik dalam masyarakat komunitarian, dan ketiga, motivasi masyarakat komunitarian ikut berpartisipasi. Melihat ketiga hal yang ingin digali, maka

menarik melihat narasi umum tentang pengaruh pendidikan terhadap partisipasi politik.

Pendidikan di Aceh Singkil masih rendah, khususnya di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Data menunjukkan perbandingan jumlah masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan tidak yaitu 1: 9.<sup>1</sup> Padahal pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi mendorong partisipasi masyarakat merespons kebijakan negara dimana kapasitasnya sebagai warga negara dalam konsep *citizenship*. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk rasionalitas warga negara dalam hal merespons kebijakan publik tadi. Lebih lanjut, rasionalitas yang dimiliki warga negara akan menjadi pengawas bagi elit yang berkuasa. Itulah sebab utama pemerintah mengupayakan kebijakan untuk mengelola pendidikan, karena memiliki dampak yang luar biasa bagi proses bertumbuh kembangnya sebuah bangsa<sup>2</sup>.

Suatu bangsa membutuhkan partisipasi politik, yaitu salah satu aspek penting terselenggaranya negara demokrasi. Karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menjadi sia-sia tanpa partisipasi publik, partisipasi publik yang akan mendukung kuatnya dukungan atau penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.<sup>3</sup> Borny juga mengatakan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau

---

<sup>1</sup> Data dari Dinas Pendidikan Singkil Utara, 30 Juli 2018

<sup>2</sup> Benny Susetyo. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.

<sup>3</sup> Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h 180

pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.<sup>4</sup>

Melihat begitu pentingnya partisipasi politik dalam negara demokrasi, maka beberapa penelitian menyebut pentingnya pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik. Beberapa kajian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan formal dengan tingkat partisipasi memilih. Salah satunya Marpaung menyatakan bahwa besarnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik.<sup>5</sup> Begitu pula penjelasan Panuntun, bahwa pendidikan memiliki hubungan yang kuat terhadap partisipasi politik masyarakat, artinya semakin baik pendidikan masyarakat maka semakin baik juga partisipasi politik yang diberikan. Baik itu dibentuk oleh pendidikan formal. Selanjutnya Ta'dung juga memaparkan bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor kesadaran politik warga negara. Kesadaran itu dibentuk oleh pendidikan formal yang didapatkan oleh individu, sehingga dapat secara sadar berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum<sup>6</sup>. Namun fenomena tersebut berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Singkil Utara, tepatnya Desa Gosong Telaga Timur, Desa Ketapang Indah dan Desa Kampung Baru.

Masyarakat Singkil Utara memiliki tingkat pendidikan cukup rendah, seperti yang dijelaskan di atas, namun tingkat partisipasi politiknya tinggi, terutama dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Banyak masyarakat yang ingin berpartisipasi di Singkil adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berpendidikan sebesar 40% dan 60% tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki pendidikan rendah. Maka menarik untuk

---

<sup>4</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, h 81

<sup>5</sup> . Fernando Marpaung, (2016). Pengaruh pendidikan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan Wali Kota 2012, *Jurnal Umrah (akan publikasi)*. Di akses pada 4 Januari 2017.

<sup>6</sup> Asrobi Panuntun, (2015) Hubungan Pendidikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Presiden 2014 di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara*, Vol 3. No. 2, h 743-753

menjelaskan sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemilihan langsung kepala desa? Kemudian bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung Kepala Desa? Terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam pemilihan langsung kepala desa?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan 3 teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di 3 desa di Kecamatan Singkil Utara, yaitu Desa Gosong Telaga Timur, Desa Ketapang Indah dan Desa Kampung Baru. Menggunakan metode kualitatif dengan harapan dapat menjelaskan obyek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>7</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sosial Budaya dan Model Masyarakat Komunitarian

Komunitarianisme adalah sebuah paham yang mengkritik keberadaan liberalisme dan lahir sejak tahun 1970an. Liberalisme dianggap terlalu memberikan kebebasan kepada individu (personal) tanpa adanya keterlibatan negara. Fokus kritik mereka pada otonomi individu, netralitas negara dan universalisme<sup>8</sup>. Namun pada masyarakat yang memiliki dimensi kultural sangat kuat, maka menjunjung tinggi kebebasan individu menjadi sebuah tantangan. Karena dalam sebuah komunitas kultural ada tanggung jawab untuk melindungi komunitas yang ikut membentuk identitas individu tersebut. Sehingga tidak hanya memprioritaskan kebebasan individu namun juga memberikan prioritas bagi komunitas<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, (2009), *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung. ALFABETA

<sup>8</sup> Ridha Aida, (2005), *Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas*. Jurnal Demokrasi, Vol. .IV. No.2

<sup>9</sup> Ibid, Ridha Aida

Komunitarianisme menganggap bahwa masyarakat sejak awal sudah terdiri dari ikatan kultural. Praktek-praktek kultural mengikat individu satu dengan individu lain dalam masyarakat. Inilah perbedaan paling mencolok, sehingga ketika liberalisme meyakini bahwa kebebasan individu satu dengan yang lain, maka berbeda dengan komunitarianisme menganggap kebebasan individu tidak akan bisa terlepas dari ikatan dengan komunitasnya, baik dalam praktek sosial dan politik.

Begitu pula yang dijelaskan oleh Taylor, bahwa seorang individu tidak akan terlepas dalam konteks komunitas tertentu dalam mengembangkan dirinya. Dalam konteks komunitas, terdapat nilai bersama berarti menjadi identitas kelompok. Sebuah nilai yang menjadi pencapaian bersama, sehingga terdapat ikatan emosional yang sama antara satu individu dan komunitas yang didasarkan pada asosiasi sukarela, melekat dan menjadi identitas bersama. Dalam komunitas tersebut, terdapat nilai kebaikan bersama yang menentukan konsepsi dasar tentang "kehidupan yang baik" bagi komunitas. Konsep kebaikan tersebut akan dianggap adil karena disepakati sebagai kebaikan bersama<sup>10</sup>.

Konsep komunitarianisme menyangkut nilai dan kebaikan bersama dihadapkan pada konsep demokrasi dan liberalisme yang ditawarkan dalam bentuk pemilihan langsung. Maka akan muncul dialektika dalam pelaksanaannya. Terutama bicara partisipasi politik. Partisipasi politik, menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum<sup>11</sup>. Keterlibatan sukarela dalam konteks demokrasi, mengedepankan kesukarelaan individu. Ini bertolak belakang dengan kondisi sosial budaya yang membentuk ikatan dalam masyarakat antar personal satu dengan lainnya.

---

<sup>10</sup> Ibid, Ridha Aida

<sup>11</sup> Ibid, Ridha Aida

Budaya masyarakat di Kecamatan Singkil Utara masih sangat kental. Hal tersebut tergambar dari beberapa budaya yang kerap dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Salah satunya budaya kesenian yang dikenal dengan tarian Dampeng. Berikut lirik tarian Dampeng.

*"Haaaayooo... Hayaaayooo... dangaaag Adenamiya lee kisah dampeng belen lae sukhaya katu nina haaaayooo... hayooo... dangaaag"* (ayo ayo dengar disana dia ada kisah tari dampeng, air besar/banjir, ayo ayo).

Tarian tersebut ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Seperti acara khianatan, pernikahan, menyambut tamu khusus dan beberapa acara seremonial lainnya.

Tarian ini diiringi dengan syair-syair khusus dengan menggunakan bahasa Singkil. Hampir mayoritas masyarakat turut serta melihat penampilan tarian ini. Karena tarian ini menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan (nasihat) bagi masyarakat secara luas. Kutipan singkat syair di atas memperlihatkan bahwa syair tersebut menyerukan ajakan. Maka tarian ini mencerminkan ajakan dan seruan untuk pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan dan kebersamaan.

Pendidikan, keagamaan dan sopan santun dalam tarian Dampeng memperlihatkan kebenaran atas moral yang disepakati bersama. Selanjutnya kebersamaan dan kekompakan dapat terlihat dari praktek gotong royong yang masih kerap dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Singkil Utara. Gotong royong atau kerja sama itu melingkup setiap prosesi yang berlangsung di desa, baik khianatan, perkawinan, perayaan acara Islam dan lain-lainnya. Kebersamaan juga terlihat dalam praktek politik.

Masyarakat turut serta memilih dalam pemilihan kepala desa, didasarkan pada ada rasa ikut-ikutan. Karena biasanya dalam satu desa terdiri dari ikatan kekeluargaan satu dengan lainnya, maka masyarakat setempat karena adanya keinginan yang hendak dicapai dan adanya rasa dukungan kepada pihak keluarga.

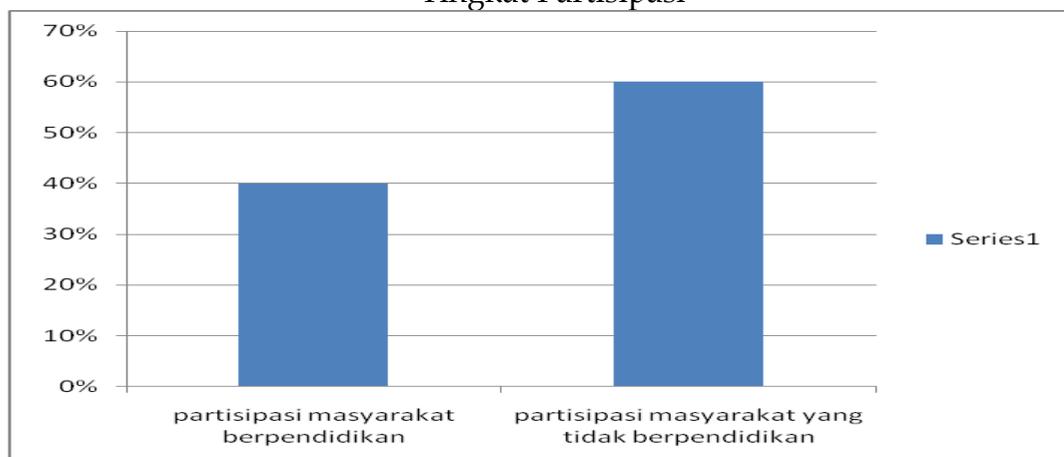
Motivasi ikut-ikutan tersebut meminggirkan rasionalitas personal, sehingga meyakini dan menyepakati “kebaikan bersama” dalam hal partisipasi. Komunitarianisme menjadi model dominan dalam praktik kebaikan bersama melalui kebersamaan dan kekompakan dalam keikutsertaan memilih elit.

## 2. Pendidikan dan Partisipasi Politik dalam Masyarakat Komunitarian

Tingkat pendidikan di masyarakat Kecamatan Singkil Utara sangatlah rendah. Secara umum pendidikan masyarakatnya didominasi SD. Rendahnya tingkat pendidikan tidak membuat apatisisme dalam hal partisipasi. Dominasi praktek komunitarianisme menentang logika umum terkait pengaruh pendidikan terhadap angka partisipasi pemilih. Ketika di satu sisi pendidikan membentuk rasionalitas seseorang untuk berpartisipasi. Namun yang terjadi sebaliknya, bahwa masyarakat yang turut serta memilih adalah yang memiliki pendidikan menengah ke bawah. Dalam hal partisipasi, ikatan komunitas yang menentukan turut berpartisipasi atau tidaknya masyarakat. Dalam konsep komunitarian, masyarakat sudah tertanam jiwa tradisi dan budaya, masyarakat yang ikut-ikutan, serta memperhatikan hak-hak keanggotaan kelompok. Hal ini sangat jelas jika kita melihat grafik di bawah ini.

Bila digambarkan dalam bentuk grafik dan terlihat sebagai berikut

Grafik I  
Tingkat Partisipasi



Sumber: Olah Data Peneliti 17 Agustus 2018

Di dalam garafik juga kita bisa melihat angka partisipasi masyarakat yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Partisipasi masyarakat yang berpendidikan sebesar 40% dan partisipasi masyarakat yang tidak berpendidikan 60%.

Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi di masyarakat pada pemilihan Kepala Desa. Masyarakat berpendidikan tinggi di Kecamatan Singkil Utara berpartisipasi hanya sebesar 40%.. Fenomena partisipasi masyarakat di Kecamatan Singkil Utara berbeda dari teori Arfani yang mengatakan bahwa Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga Negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society.<sup>12</sup> Jadi masyarakat di 3 desa dalam Kecamatan Singkil Utara didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi politik. Rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat model komunitarian bisa dikatakan keterkaitan partisipasi dan irasionalitas karena didasarkan pada ikatan nilai pada komunitas tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Adek, seorang warga Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil:

*“Setiap pemilihan Kepala Desa di Gosong Telaga ini, saya tidak mau ketinggalan dalam pemilihan. Saya mau memilih karena saya berharap setiap Kepala Desa yang saya coblos memberikan perubahan kepada kampung saya ini. Saya juga ingin kampung saya ini maju, aman, dan tentram. Meskipun saya hanya tamat SMP dan tidak banyak yang saya ketahui dalam pendidikan dan lain-lain. Tapi saya hanya ingin kemajuan untuk Desa saya ini”<sup>13</sup>.*

Partisipasi adalah salah satu aspek penting wujud demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi yaitu orang yang paling tahu tentang apa yang baik tentang dirinya adalah orang itu sendiri, karena keputusan dan kebijakan politik yang akan dilaksanakan oleh sebuah lembaga politik yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat berhak

---

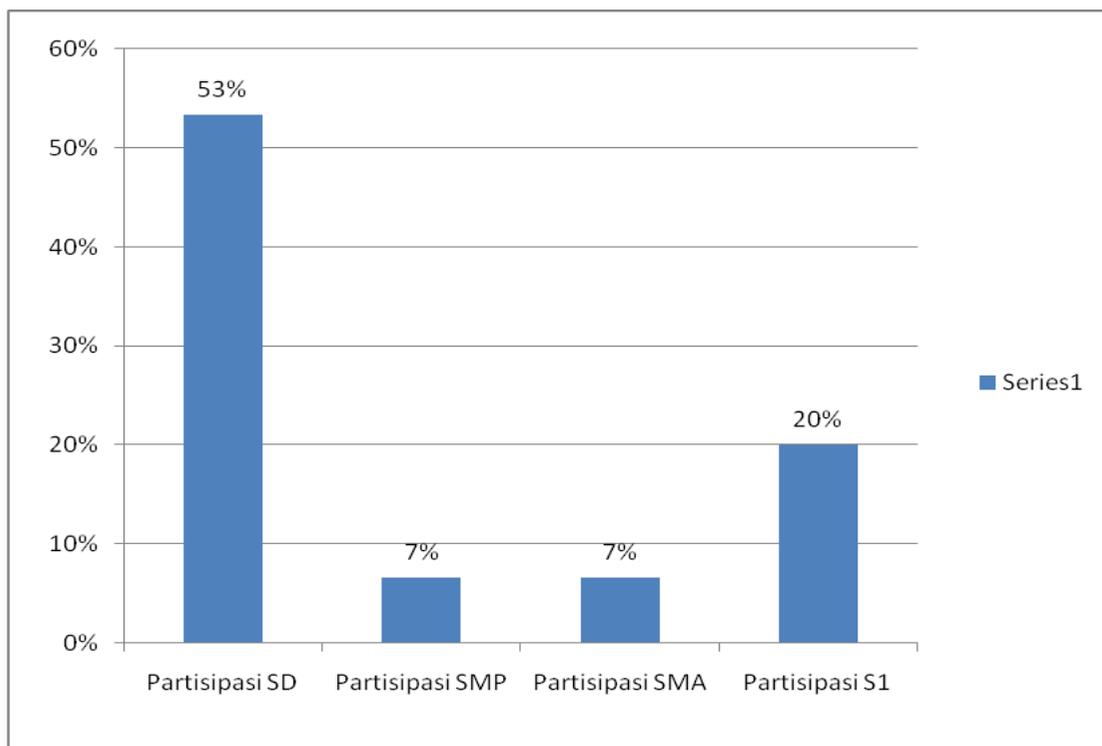
<sup>12</sup> Ibid, Fernando Marpaung

<sup>13</sup> Wawancara, Aceh Singkil, 27 juli 2018

ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut, sekiranya keputusan itu baik maka akan diikuti, dan sekiranya tidak membawa keuntungan yang berarti bagi masyarakat maka akan di tinggalkan.<sup>14</sup>

Partisipasi adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, ikut memberikan suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik. Dalam partisipasi ini bisa individual atau kelompok, terorganisir atau spontan, mantap dan sportif atau tidak efektif.<sup>15</sup> Berikut tergambar dalam tabel grafik tingkat partisipasi berdasarkan pendidikan.

Grafik II  
Tingkat Partisipasi Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Olah Data Penelitian, 17 Agustus 2018

<sup>14</sup> Eka Januar. (2008), Partai Politik Lokal Dalam Konsep Aceh Utara : Studi di Kabupaten Aceh Utara. *Skripsi*. Malikussaleh. Lhokseumawe

<sup>15</sup> Sahdan, G dan Muhtar.H. (2009). *Evaluasi kritis penyelenggaraan pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), Anggota IKAPI

Jika kita melihat dari grafik 2 bahwa pendidikan tidak menyebabkan tingginya partisipasi pada pemilihan langsung kepala desa. Angka penduduk tamat SD sangat dominan berpartisipasi dalam pemilihan. Hal ini tidak sebanding jika kita melihat ke arah yang angka masyarakat berpendidikan. Melihat dari grafik tersebut, sangat menyedihkan jika melihat angka partisipasi pada masyarakat yang berpendidikan. Tingkat pendidikan tidak menentukan tinggi rendahnya partisipasi dalam memilih.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, pendidikan sama sekali tidak mempengaruhi partisipasi. Menurut peneliti dengan tidak tingginya pendidikan, tidak mempengaruhi partisipasi seseorang dalam memilih. Harapan salah seorang warga Gosong Telaga akan kemajuan untuk desanya sendiri sangat besar. Ia memberikan dukungan penuh kepada yang ia pilih demi ketentraman dan kesejahteraan desanya. Berikut penjelasan Ketua Pemuda, Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara.

*Desa Gosong Telaga dalam berpartisipasi saya sebagai Ketua Pemuda bangga dengan warga masyarakatnya, mereka sangat antusias dalam berpartisipasi. Setiap pemilihan Kepala Desa, warga selalu ramai datang dengan kompak ke lokasi untuk memilih. Meski pendidikan mereka padam, namun tidak memadamkan semangat partisipasi mereka”<sup>16</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran partisipasi masyarakat Desa Gosong Telaga dalam pemilihan Kepala Desa tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Namun fokus utama adalah perubahan dan kesejahteraan. Berikut penjelasan dari Mausum , seorang warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil mengatakan:

*“Setiap saya memilih yang ada di ingatan saya ialah, mungkin dengan saya memilih semoga ada perubahan dalam Desa saya ini. Perubahan yang saya maksud ialah perubahan dalam kemakmuran, kesejahteraan dan kekompakan sesama satu Desa. Dan yang paling utama ialah membangun Silaturahmi dalam sesama Desa”(wawancara 27 juli 2018).*

---

<sup>16</sup> Wawancara, di Aceh Singkil, 30 juli 2018

Begitu pula dengan Riski Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil:

*“Memang belum tentu dengan saya berpartisipasi harapan dan keinginan saya terwujud. Namun saya berusaha dengan berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa semoga dengan terpilihnya Kepala Desa sekarang membawa perubahan dan dampak yang lebih baik lagi bagi Desa kami tercinta ini”<sup>17</sup>.*

Model masyarakat komunitarian dalam menyepakati nilai kebaikan bersama, bukan menjadi otoritas elit memaksa society, namun lebih pada kesadaran akan hadirnya kesepakatan akan nilai bersama. Maka masyarakat memilih tidak karena paksaan dari siapa pun, melainkan keinginan sendiri atas kepercayaan ikut-ikutan bukan rasionalitas. Dapat dikatakan bahwa nilai bersama memudahkan rasionalitas atas pilihan masyarakat. Ikatan komunitas berpengaruh pada irasionalitas pilihan. Namun hal yang penting disiasati adalah menguatnya model komunitarian dan irasionalitas akan membentuk skeptis dan pesimistis pada kelompok rasional dalam hal pemilihan dan pembangunan.

### **3. Motivasi dan Partisipasi Politik dalam Masyarakat Komunitarian**

Ketika secara analitis, pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi pemilih. Beberapa penjelasan di atas juga memperlihatkan bahwa partisipasi pemilih tidak didasarkan pada rasionalitas menggambarkan keinginan mereka akan perubahan kesejahteraan, tanpa mendefinisikan detail sosok elit yang akan mampu memperjuangkan pembangunan tersebut seperti apa. Karena bicara kebaikan bersama dan kesejahteraan tersebut merupakan hal yang berbeda.

Kebaikan yang dipatuhi bersama, belum tentu menyejahterakan bersama. Maka menarik bila menggali motivasi masyarakat komunitas memilih dan terlibat berpartisipasi dalam pemilihan. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya perilaku seseorang ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi berkaitan dengan apa yang diinginkan manusia (tujuan), mengapa ia

---

<sup>17</sup> Wawancara, di Aceh Singkil, 28 juli 2018

menginginkan hal tersebut (motif), dan bagaimana ia mencapai tujuan tersebut (proses)<sup>18</sup>.

Motivasi dalam masyarakat komunitarian, tepatnya Kecamatan Singkil Utara dalam memilih adalah karena ikatan kepentingan kekeluargaan. Sehingga tindakan atas dasar “ikut-ikutan” cukup dominan. Tindakan yang didorong oleh ikut-ikutan ini lahir karena adanya rasa kekompakan dan kebersamaan. Seperti halnya dalam budaya gotong royong masyarakat Kecamatan Singkil Utara. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan di dalam masyarakat. Masyarakat mengelaborasi ikatan kekeluargaan atau hubungan emosional dengan kapasitas dalam pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Anjeli salah seorang warga Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil mengatakan:

*“Berdasarkan dari 3 calon Kepala Desa, saya memilih bapak Kentong sebagai Kepala Desa. Saya memilih bapak Kentong sebagai Kepala Desa karena bapak Kentong dekat dengan saya dan beliau juga merupakan sahabat saya. Saya memilih bukan hanya karena alasan kentong sebagai teman saya (calon Kepala Desa) tetapi saya memilih karena saya ingin sekali desa saya adanya kemajuan dan perubahan. Mungkin salah satu untuk mewujudkan keinginan saya tercapai ialah dengan cara saya berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa ini. Saya berusaha dengan berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa semoga dengan terpilihnya Kepala Desa yang saya pilih membawa perubahan dan dampak yang lebih baik lagi bagi Desa kami tercinta ini.”<sup>19</sup>*

Tidak jauh berbeda dengan kutipan wawancara berikut, yaitu Dahrul salah seorang warga Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil mengatakan:

*“Saya memilih Hj.Marwan Hakim sebagai Kepala Desa. Saya memilih beliau karena menurut saya beliau ini mampu dalam membangun Desa ini, beliau juga sudah lama saya kenal sebagai teman lama saya. Dari pemilihan Kepala Desa, Bupati, Gubernur, dan presiden saya selalu ikut berpartisipasi dalam hal pemilihan. Dan saya tidak mau ketinggalan*

---

<sup>18</sup> Mulyasa. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

<sup>19</sup> Wawancara, Aceh Singkil, 30 juli 2018

*dalam hal memilih. Karena saya sangat ingin perubahan dan kemajuan khususnya Desa yang saya tempati ini.”<sup>20</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sangat mendukung dalam mewujudkan perubahan. Karena dengan cara berpartisipasi merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu keinginan atau perubahan yang hendak dicapai atau diinginkan. Namun partisipasi didasari karena melihat kedekatan dengan para calon Kepala Desa, yaitu adanya hubungan pertemanan antara pemilih dengan calon Kepala Desa.

Hubungan personal dalam komunitas dan ikatan kekeluargaan mendorong keikutsertaan tidak dirasakan sebagai bentuk paksaan. Berikut penjelasan salah seorang masyarakat Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil mengatakan:

*“Dari 3 para calon Kepala Desa, saya memilih Rahmat sebagai Kepala Desa. saya memilih Rahmat sebagai Kepala Desa karena menurut saya Rahmat mampu dalam memajukan Desa ini. Saya juga menilai dia jujur dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan paksaan atau intimidasi dalam pemilihan. Ini murni dari hati nurani saya. Jika saya tidak menggunakan hak pilih saya, saya merasa rugi. Toh memilih sekali dalam lima tahun. Ini bukan waktu pendek, butuh perjuangan kita menunggu berjalannya waktu dalam menunggu 5 tahun mendatang dalam menggunakan hak pilih suara kita. Dan saya tidak mau adanya timbul perasaan menyesal bagi diri saya ketika saya tidak memilih.”<sup>21</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tingginya kesadaran diri sendiri pada responden menggunakan hak pilihnya. Tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, kesadaran masyarakat mendorong tingginya partisipasi, salah satu penyebab utama adalah hubungan masyarakat dengan para calon. Selanjutnya irasionalitas meningkat, karena tindakan partisipasi didasarkan pada budaya ikut-ikutan. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan model masyarakat komunitarian, yang

---

<sup>20</sup> Wawancara, Aceh Singkil, 31 juli 2018

<sup>21</sup> Wawancara, Aceh Singkil, 30 juli 2018

mana tidak mendasarkan penilaian terhadap profil kandidat maupun motivasi untuk memilih secara rasional di masing-masing pemilih.

#### D. KESIMPULAN

Konsep demokrasi mengalami tantangan dalam praktiknya. Benturan konseptual dan praktik tersebut akan mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Pada hakikatnya, sebelum konsep demokrasi dijadikan kiblat banyak negara, setiap negara (secara luas) dan daerah (secara khusus) sudah memiliki nilai yang membentuk budaya di daerah tersebut. Nilai yang disepakati dan dianut akan merespons proses demokrasi dengan caranya sendiri. Hal tersebut terjadi pada model masyarakat komunitarian yang dipraktikkan di Aceh Singkil.

Fenomena tersebut terlihat detil pada tidak adanya korelasi tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi. Semakin tinggi pendidikan bukan berarti meningkatkan partisipasi, namun sebaliknya, data menunjukkan masyarakat yang berpendidikan rendah lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Dimensi lain dari model masyarakat komunitarian adalah menyepakati "nilai kebaikan bersama", sehingga kesepakatan kolektif itu mempengaruhi kesadaran dan pilihan politiknya ketika berpartisipasi dalam pemilihan. Seperti halnya budaya ikut-ikutan dalam masyarakat komunitarian dan budaya politik kaula cenderung dominan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Diplomatic Relations between Indonesia-Australia Since Whitlam, Fraser, Until Hawke Era in An Attempt To Establish Political Stability in Southeast Asia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(2), 237-252. doi:10.26811/peuradeun.v5i2.135
- Asrobi Panuntun, (2015)., *Journal Hubungan Pendidikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Presiden 2014 di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Administrasi Negara*, Vol. 3 No.2
- Benny Susetyo. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Eka Januar. (2008), Partai Politik Lokal Dalam Konsep Aceh Utara : Studi di Kabupaten Aceh Utara. *Skripsi*. Malikussaleh. Lhokseumawe
- Fernando Marpaung, (2016), Pengaruh pendidikan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan Wali Kota 2012, *Jurnal Umrah (akan publikasi)*. Di akse pada 4 Januari 2017.
- Haynes, J. (2015). Religion in Global Politics: Explaining Deprivatization. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 199-216.
- Mulyasa. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Ridha Aida, (2005), *Liberalisme dan Komunitaranisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas*. Jurnal Demokrasi, Vol. IV. No.2
- Sahdan, G dan Muhtar.H. (2009). *Evaluasi kritis penyelenggaraan pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), Anggota IKAPI
- Sugiyono, (2009), *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung. ALFABETA
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2012). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Tabrani ZA. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA

